

ANALISA JARINGAN KOMUNIKASI TKN JOKOWI-MA'RUF DAN NU DI JABAR PADA PILPRES 2019

Regit Ageng Sulistyio

Program Studi Magister Komunikasi Politik , Universitas Paramadina Jakarta

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jaringan komunikasi TKN Jokowi-Ma'ruf dan NU di provinsi Jawa Barat pada pilpres 2019 lalu. Penelitian menggunakan metode jaringan, dimana aktor memiliki jaringan tersendiri, dan apa yang dilakukan peneliti adalah menggambarkan relasi aktor (responden) tersebut dengan aktor lain. Dengan karakteristik penelitian jaringan semacam ini, konsekuensinya ada pada penarikan sampel untuk penelitian jaringan. Hasil penelitian mencerminkan dukungan PBNU dan GP Ansor merupakan konsekuensi dari didapuknya Rais Aam PBNU, KH. Ma'ruf Amin, sebagai Calon Wakil Presiden mendampingi Jokowi. Sosok KH. Ma'ruf Amin yang turut berperan sebagai saksi ahli yang turut memberatkan hukuman bagi mantan pendamping Jokowi di Pemprov DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), awalnya diharapkan dapat meng-*counter* isu-isu anti agama dan anti Islam yang menyerang Jokowi. Akan tetapi, pada prakteknya, keberadaan KH. Ma'ruf Amin, beserta gerbong dukungan PBNU dan GP Ansor tidak membuat isu-isu anti agama dan anti Islam mereda. Berbagai bentuk komunikasi pemerintah dan juga PBNU dalam koridor upaya deradikalisasi agama—yang menguat sejak Pilpres 2014—justru membuat dikotomi NU serta pihak Pemerintah dengan non-NU (kelompok-kelompok yang terafiliasi dengan peserta Aksi Bela Islam seperti FPI, GNPF Ulama) justru menguat. Dalam konteks Jabar, upaya 'mendekati' kelompok-kelompok Islam dilakukan dengan memusatkan peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2018 di Bandung dan Garut. Di mana dari penelusuran penulis penetapan 22 Oktober sebagai momen peringatan HSN 2018 diputuskan tanpa merangkul semua golongan/kelompok Islam selain NU, bahkan Muhammadiyah—sebagai organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia.

Kata kunci : Jaringan komunikasi, Jokowi-Ma'ruf, Pilpres, NU

PENDAHULUAN

Jawa Barat (Jabar) merupakan provinsi dengan Daftar pemilih Tetap (DPT) terbanyak di Indonesia (Antares, 2019). Pada April 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan DPT di Provinsi Jabar berjumlah 33.270.845 pemilih, dari total 190.770.329 pemilih di Indonesia (Antares, 2019). Sebagai provinsi dengan jumlah DPT terbesar, Jabar menjadi provinsi yang diperebutkan, oleh dua pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang bertarung dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, yakni Capres-Cawapres Nomor Urut 01: Joko Widodo-KH Maruf Amin ("Jokowi-Maruf") dan Capres-Cawapres Nomor Urut 02: Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ("Prabowo-Sandi").

Pada Pilpres 2014, pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa ("Prabowo-Hatta") unggul dari pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla ("Jokowi-JK") di Jabar. Saat itu, Prabowo-Hatta memperoleh 14.167.381 suara atau 59,78 persen suara di Jabar. Sementara, perolehan suara Jokowi-JK sebanyak 9.530.315 suara atau 40,22 persen suara (Kuswandi, 2019). Dengan perolehan suara tersebut, Prabowo-Hatta menang di 22 kabupaten (kab.) & kota di Jabar. Adapun Jokowi-JK hanya menang di empat kab. & kota, yakni: Kab. Subang, Kab. Indramayu, serta Kab. dan Kota Cirebon.

Salah satu upaya yang dilakukan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf untuk memenangkan pasangan ini di Jabar adalah dengan mengedepankan pendekatan keagamaan. Hal ini dilatarbelakangi oleh karakteristik masyarakat Jabar yang cenderung agamis. Dalam hal ini, TKN Jokowi-Ma'ruf menggunakan NU sebagai 'kendaraan' untuk mendekati kelompok-kelompok Islam di Jabar melalui serangkaian kegiatan. Hal ini dimungkinkan mengingat posisi KH Ma'ruf Amin yang sebelumnya menjabat sebagai Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Rais Aam sendiri merupakan jabatan Ketua Umum *Syuriah* atau pimpinan tertinggi NU yang beranggotakan para Kiai besar NU. Terpilihnya KH Ma'ruf Amin sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang mendampingi Jokowi kemudian juga turut berpengaruh pada terbawanya 'gerbong' NU dalam sejumlah kegiatan, baik dalam konteks kampanye maupun dalam konteks peringatan hari-hari besar keagamaan yang dilakukan Pemerintah Pusat.

Namun, berbagai upaya yang dilakukan Jokowi di Jabar melalui pendekatan keagamaan ke beberapa tokoh ulama dan ponpes tak membuahkan hasil maksimal. Pada Pilpres 2019, dari 27 Kabupaten/Kota di Jabar, pasangan Jokowi-Maruf hanya unggul di 6 wilayah, yakni: Kab. Indramayu, Kab. Subang, Kota dan Kab. Cirebon, Kota Banjar, dan Kab. Pangandaran (Solehudin, 2019). Sedangkan, pasangan Prabowo-Sandi unggul di 21 kab. & kota. Di Jabar, pasangan Jokowi-Maruf meraih 10.750.568 suara atau 40,07 persen suara, sementara pasangan Prabowo-Sandi meraih 16.077.446 suara atau 59,93 persen suara (CNN Indonesia, 2019). Hasil ini menunjukkan bahwa perolehan suara Jokowi sebelum dan setelah menjadi Presiden tak berbeda jauh. Bahkan menurun 0,15 persen jika dibandingkan dengan perolehan suara pada Pilpres 2014. Wilayah yang dimenangkan Jokowi di Jabar pun hampir tak berubah, hanya ada penambahan Kab. Banjar—dengan jumlah DPT paling kecil di Jabar yakni 0.15 juta pemilih—dan Kab. Pangandaran—dengan jumlah DPT terkecil ke-4 se-Provinsi Jabar (Lihat Databoks Katadata, 2019).

Kekalahan pasangan Jokowi-Maruf di Jabar ini kemudian menarik minat penulis untuk mencari tahu lebih mendalam mengenai hal apa saja sebenarnya yang membuat perolehan suara pasangan ini cenderung stagnan—dan bahkan menurun. Padahal sejumlah pendekatan telah dilakukan. Upaya ini akan penulis lakukan dengan memetakan dan menganalisis struktur jaringan komunikasi TKN Jokowi-Ma'ruf yang terbentuk di Jabar. Terutama jaringan komunikasi yang terbentuk antara TKN Jokowi-Ma'ruf dengan NU, sebagai kelompok Islam terbesar yang secara tidak langsung mendukung pasangan tersebut dalam sejumlah kegiatan/peristiwa.

Pemetaan dan analisa struktur jaringan komunikasi ini digunakan untuk melihat keseluruhan langkah dan pendekatan yang dilakukan TKN beserta jaringan-jaringan komunikasi yang terbentuk dari setiap langkah dan pendekatan tersebut. Sehingga, akan dapat diketahui faktor apa yang membuat sejumlah langkah strategis itu tak berdampak banyak bagi peningkatan suara Jokowi-Maruf di Jabar. Dalam pemetaan dan analisa struktur jaringan komunikasi ini penulis akan menggunakan *Actor Network Theory* (ANT) yang digagas oleh Michel Callon, Bruno Latour dan John Law. Penulis melihat bahwa pemetaan dan analisa struktur jaringan komunikasi dengan menggunakan ANT sangat mungkin dilakukan. Terutama untuk melihat distribusi sejumlah isu, termasuk aktor-aktor yang dilibatkan dalam jaringan komunikasi yang terbentuk dalam distribusi isu tersebut.

KERANGKA TEORETIK

Jaringan Komunikasi

Jaringan secara sederhana bisa didefinisikan sebagai seperangkat aktor yang mempunyai relasi dengan aktor lain dalam tipe relasi tertentu (Eriyanto, 2014: 5). Newman (2003: 168) mendefinisikan jaringan sebagai seperangkat *item* yang disebut dengan *node* atau kadangkala disebut dengan *vertex*, dengan hubungan antara mereka yang disebut dengan *edges* atau *ties*. Adapun Littlejohn mendefinisikan jaringan sebagai struktur sosial yang tercipta dari (proses) komunikasi antar individu dan grup. Menurut Littlejohn (2001: 303), struktur dasar dari teori jaringan adalah keterhubungan (*connectedness*)—individu berkomunikasi dengan individu lainnya kemudian terhubung bersama ke dalam grup yang pada gilirannya terhubung bersama ke dalam jaringan keseluruhan.

Sedangkan menurut Eriyanto (2014: 5), studi jaringan komunikasi menggambarkan relasi aktor (bisa orang, lembaga, perusahaan, negara dan sebagainya) satu dengan lainnya dalam struktur sosial tertentu. Studi jaringan komunikasi tidak memfokuskan pada data atributif, yang menjadi perhatian dari studi jaringan adalah data relasional—hubungan atau relasi antara satu aktor dengan aktor lain (Eriyanto, 2014: 5).

Menurut Marin and Wellman (2011: 13 dalam Eriyanto, 2014: 5) terdapat karakteristik penting dari penelitian jaringan. *Pertama*, penelitian jaringan memusatkan perhatian pada relasi dan bukan atribut. Pendekatan jaringan mempercayai bahwa sikap atau perilaku merupakan hasil dari jaringan. (lihat Marin dan Wellman, 2011: 13). Dalam jaringan, individu tidak dilihat independen, sebaliknya dilihat saling tergantung (interdependen) dengan orang lain dan jaringan sosial (Vera and Schupp, 2006: 408).

Kedua, apa yang menjadi fokus dalam penelitian adalah jaringan dan bukan kelompok (*group*). Penelitian jaringan berangkat dari asumsi bahwa aktor adalah anggota atau bagian dari suatu jaringan, bukan kelompok (*group*). Seorang aktor bisa saja anggota kelompok, tetapi ia mempunyai jaringan yang lebih luas dari kelompok (Eriyanto, 2014: 11). Dalam penelitian jaringan, yang dilihat bukan dari mana asal kelompok individu, melainkan jaringan apa yang dibentuk oleh individu (Wellman, 1998: 37 dalam Eriyanto, 2014: 11). Sangat dimungkinkan seorang aktor (individu) mempunyai jaringan dengan orang dari lintas kelompok yang berbeda (Eriyanto, 2014: 11).

Dalam penelitian jaringan, aktor memiliki jaringan tersendiri, dan tugas peneliti untuk menggambarkan relasi aktor (responden) tersebut dengan aktor lain. Karakteristik penelitian jaringan semacam ini, membawa konsekuensi pada penarikan sampel untuk penelitian jaringan (Eriyanto, 2014: 11). Teknik penarikan sampel pada studi jaringan lebih rumit dan kompleks dibandingkan dengan penelitian atributif, seperti survei. Karena penelitian jaringan lebih melihat pada jaringan, dan jaringan secara teoretis tidak terbatas—peneliti tidak bisa membatasi relasi orang pada kelompok tertentu. *Ketiga*, relasi antar-aktor dalam penelitian jaringan harus dipahami dalam konteks relasional tertentu (Eriyanto, 2014: 11). Dalam penelitian jaringan, posisi aktor tidaklah independen, tetapi ditentukan oleh relasi dengan aktor-aktor lain dalam jaringan sosial. Untuk mengerti bagaimana posisi aktor atau relasi aktor dengan aktor lain, peneliti harus melihat relasi aktor tersebut dengan aktor-aktor lain dalam jaringan (Eriyanto, 2014: 12). *Keempat*, aktor dan relasi aktor pada analisis jaringan harus dilihat dalam perspektif struktural. Posisi aktor ditentukan oleh posisi aktor lain dalam struktur. Aktor bisa menempati posisi yang berbeda jika berada dalam suatu struktur tertentu (Eriyanto, 2014: 12). Oleh karena itu, analisis jaringan bersifat struktural, mengaitkan aktor dengan aktor lain, aktor dengan kelompok, dan pada akhirnya aktor dengan sistem secara keseluruhan (Monge, 1987: 247-248 dalam Eriyanto, 2014: 12).

Wellman (1983: 157 dalam Eriyanto, 2014: 12) menjelaskan bahwa: “Cara paling langsung untuk mempelajari struktur sosial yaitu dengan menganalisis pola hubungan yang menghubungkan anggotanya.” Analisis-pola-hubungan mencoba menggambarkan pola dan menggunakan deskripsi jaringan untuk mempelajari bagaimana struktur jaringan membatasi perilaku sosial dan perubahan sosial. Lebih lanjut, Wellman (1983) mengatakan bahwa deskripsi dalam penelitian jaringan didasarkan pada konsep ikatan jaringan sosial yang menghubungkan *node* dalam suatu sistem sosial—ikatan yang menghubungkan masing-masing orang, dan kelompok, organisasi.

Analisis jaringan ingin mengetahui bagaimana sifat struktural mempengaruhi perilaku—di luar efek normatif, atribut pribadi, dan hubungan *dyadic*. Ia berkonsentrasi untuk mempelajari bagaimana pola hubungan dalam jaringan memberikan peluang atau hambatan yang signifikan karena mempengaruhi akses masyarakat dan lembaga untuk sumber daya seperti informasi, kekayaan dan kekuasaan. Dengan demikian, analisis jaringan memperlakukan sistem sosial sebagai jaringan hubungan ketergantungan yang dihasilkan dari perbedaan kepemilikan sumber daya yang langka pada *node* dan alokasi terstruktur sumber daya ini pada relasi.

Actor-Network Theory (ANT)

Actor-Network Theory (ANT) adalah pendekatan sosiologis yang memperlakukan fenomena sosial sebagai dampak dari jaringan. Pendekatan ini berfokus pada evolusi dari interaksi dalam jaringan dari waktu ke waktu, di mana ANT melihat bahwa segala sesuatu hidup/berjalan/berproses dalam sebuah jaringan. ANT berupaya untuk menjelaskan ‘*social order*’ tidak melalui pemikiran esensial mengenai ‘sosial’ namun melalui jaringan keterhubungan antara agen manusia, teknologi dan objek. Dalam pandangan ANT, ketika realitas sosial berjalan, semua aktor akan menjadi sebuah jaringan yang terhubung satu sama lain, dan membentuk ‘jaringan-aktor’ (*actor-network*). Entitas, baik *human* maupun *non-human* dalam jaringan tersebut mendapatkan pengaruh melalui kuantitas, kedalaman dan keluasan serta stabilitas keterhubungan di antara mereka.

ANT dikembangkan sebagai bagian dari gerakan ilmiah yang disebut dengan STS (*Science and Technology Studies* atau *Science, Technology, Society*)—sebuah bidang riset yang dirancang khusus untuk menyelidiki munculnya realitas sosial dan temuan-temuan teknologi (Vicsek et al, 2016: 78). Gerakan ilmiah ini bermula di tahun 1980-an, saat dua riset yang dinilai memberikan dasar pemahaman konseptual dan metodologi tentang STS dipublikasikan. Kedua riset tersebut adalah *The Social Shaping of Technology* (Mackenzie et al., 1989) dan *The Social Construction of Technological Systems* (Bijker et al., 1987). Walaupun terdapat banyak perbedaan di antara kedua riset tersebut, namun keduanya berusaha untuk menyoroti pentingnya dorongan sosial (*social forces*) dan aktor sosial dalam pengembangan temuan teknologi, sistem, dan jaringan (Vicsek et al, 2016: 78).

Dalam naungan STS, pendekatan khusus kemudian dikembangkan di *Centre de Sociologie de l’Innovation (CSI) of the Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris* di antaranya oleh Michel Callon (1984), Bruno Latour (1984) dan John Law (1986). Pendekatan ini kemudian menjadi cikal-bakal lahirnya ANT—yang mendasarkan pemahaman konseptualnya pada sejumlah pemikiran seperti semiotik dari Algirdas Julien Gerimas (Beetz, 2015), serta pemikiran filsafat Michel Serres (Brown, 2002) dan Gilles Deleuze (Law, 2009). Sebagaimana dikatakan Sismondo (2004: 65) ‘pendekatan khusus’ dari STS ini berupaya untuk memahami bahwa kerja-kerja ilmiah dan teknik rekayasa (*engineering*) sebagai elemen dari bangunan jaringan yang kuat (Vicsek et al, 2016: 78). Karena itu, pendekatan ANT merupakan pendekatan interdisipliner. Dalam lingkup ANT, ilmuwan dan insinyur, sama

halnya dengan aktor politik dalam kontestasi politik, juga berupaya untuk membangun dan memelihara aliansi dalam upayanya meraih dan mempertahankan kuasa (*power*), di mana upaya ini dilakukan dengan membangun aliansi di antara elemen-elemen heterogen (Sismondo, 2004) yang kemudian membentuk sebuah jaringan.

Mengacu pada pemahaman di atas, pendekatan yang ditawarkan ANT dapat dikategorikan dalam pendekatan *post-structuralism* (Ritzer, 2008: 656; Law, 2009). Kemiripan antara ANT dan *post-structuralism* dapat ditemukan pada beberapa konsep seperti ‘*relationality*’ (Vicsek et al, 2016: 79). *Relationality* memaknai bahwa entitas tidak memiliki arti/esensi dalam dirinya sendiri, melainkan, karakteristik dan batasan-batasan dirinya dibentuk melalui hubungannya dengan elemen-elemen lainnya (Ritzer, 2008: 656 dalam Vicsek et al, 2016: 79). Sama dengan pendekatan *post-structuralism*, ANT juga *anti-foundational*; di mana, ANT menghindari penjelasan mengenai perubahan-perubahan sosial melalui rangkaian spesifik kausalitas/hubungan sebab-akibat, yang mereduksi ruang lingkungannya semata pada unsur-unsur sosial maupun unsur-unsur materi saja (Ritzer, 2008: 656; Law, 2007 dalam Vicsek et al, 2016: 79). Adapun, istilah aktor dan jaringan dihubungkan untuk memangkas perbedaan antara agensi dan struktur. Dalam hal ini, jaringan digambarkan sebagai sebuah proses dan ragam aktivitas yang dibangun oleh sejumlah aktor, di mana aktor-aktor tersebut terbentuk dari jaringan. Ketika berbagai jenis aktan tadi berasosiasi, maka akan terbentuk ‘aktor-jaringan.’

Dalam pemahaman ANT, perkembangan sains dan teknologi selalu dilalui dengan proses yang rumit (*‘messy’*) dan dipenuhi oleh berbagai elemen yang saling terkait satu sama lain (Vicsek et al, 2016: 79). Dalam hal ini, penelitian ANT berupaya untuk menunjukkan bagaimana ‘rumit’ –nya realitas ilmiah sebelum ia diterima sebagai ‘*cold, hard facts*’ (Vicsek et al, 2016: 79). Dalam konteks ANT, sesuatu terbilang rumit sebab segala bentuk kekuatan dan dampak (sosial, politik, finansial, dll) membentuk dan membangun entitas jaringan sebelum ia mencapai bentuk ‘final’ –nya. Ketika mereka pada akhirnya sampai pada tahap ‘final’, mereka menjadi bagian dari jaringan yang lebih besar dalam lingkup ‘*black box*’ (Vicsek et al, 2016: 80). Stalder (1997) mengartikan ‘*black box*’ sebagai suatu keadaan/pengaturan (*setting*) yang mana, tak peduli sekompleks atau serumit apapun keadaan/pengaturan tersebut atau sebesar/sepanjang apapun proses terbentuknya, kemudian menjadi stabil/tetap dan pasti, sehingga keadaan/pengaturan tersebut dapat diperlakukan sebagai fakta (ilmiah)—atau temuan teknologi—di mana hanya proses *input* dan *output*-nya yang diperhitungkan. Terminologi ‘*black box*’ ini berasal dari pendekatan *cybernetics*, di mana pendekatan tersebut menandai bagian/potongan dari mesin/mekanisme atau sebuah perangkat perintah, yang mungkin saja sangat kompleks namun dapat digantikan oleh sebuah ‘*box*’ karena ia teratur dan stabil (Latour, 2005).

Undang-undang, May dan Powell (2008) mencontohkan, adalah kumpulan dari *black box*. Dalam fase pembentukannya, Undang-undang adalah seperangkat kalimat yang diperdebatkan, yang mana kadang-kadang sebuah aliansi besar dibangun untuk mempengaruhi bentuk spesifik dari undang-undang tersebut. Selama proses legislatif berlangsung, seperangkat kalimat dalam undang-undang tadi bersifat cair dan terbuka. Namun, ketika proses legislasi telah selesai, seperangkat kalimat tadi menjadi *black box*, menyegel semua elemen, yang mana perubahan (atas undang-undang tersebut) mungkin saja terjadi, namun perubahan tersebut terjadi dalam relasi yang tetap dan stabil, yang mana hal itu tidak dapat dipertanyakan dengan mudah (May dan Powell, 2008). Dalam arti, perubahan undang-undang, dapat diusulkan sesuai dengan konteks undang-undang tersebut, dan harus disetujui oleh mayoritas aktor (dalam hal ini fraksi partai dalam badan legislatif) yang terlibat dalam pembuatan undang-undang tersebut. Contoh ini menyoroti bagaimana ANT berupaya

untuk memahami apa yang terjadi sebelum peristiwa ‘black-boxing’ tadi—melalui inskripsi (teks/data/informasi) yang terdapat pada *intermediaries* (perantara) yang beredar dalam jaringan tersebut.

Dalam hal ini, ANT berupaya melihat keragaman, kumpulan (*assemblage*), yang membentuk sebuah jaringan komunikasi. Apa yang ingin dijelaskan ANT bukanlah sebuah struktur yang membentuk suatu pemaknaan tertentu, melainkan keragaman, rupa-rupa dan ketersaling-hubungan antar satu aktor dengan aktor lainnya. ANT mengklaim realitas tidak mungkin dapat secara lengkap dipahami tanpa membayangkannya sebagai jejaring yang saling kait-mengait. Sehingga, dalam ANT, entitas sosial dan entitas teknis adalah dua aspek dari realitas tunggal: jaringan aktor.

Calon (1993, 263) mendefinisikan jaringan sebagai ‘*group of unspecified relationships among entities of which the nature itself is undetermined*’. Karakter inklusif dari definisi ini menjadi lebih jelas ketika dibandingkan dengan salah satu definisi sosiologi konvensional dari jaringan yakni *social network* yang berisi seperangkat aktor dan relasi atau relasi yang didefinisikan di antara mereka (aktor). Sebuah jaringan-aktor tidak terbatas pada ‘aktor sosial’, tidak pula pada aktor dalam pengertian yang lebih luas. Sebuah jaringan mengikat secara bersama-sama dua sistem aliansi, yakni ‘*sociogram*’ dan ‘*technogram*’. Sociogram mengacu pada setiap orang yang terlibat dalam penemuan, pembangunan, distribusi dan penggunaan dari sebuah artefak/objek. Analisa jaringan sosial berfokus pada susunan dari aliansi ini (Wasserman dan Faust, 1994). Sementara *technogram* mengacu pada segala hal yang sudah ada dalam jaringan tersebut atau dibawa ke dalam jaringan dengan tujuan untuk menghubungkan orang (Latour, 2005). Dalam terminologi ANT, *sociogram* dan *technogram* ini saling terhubung.

Pemahaman di atas berdampak pada pandangan terhadap aktor. Dalam terminologi Latour (1992: 241), aktor diartikan sebagai “*entities that do things.*” Dengan definisi ini, ANT berupaya untuk melihat bagaimana institusi/bangunan komunikasi terbentuk melalui serangkaian interaksi antar aktor, di mana aktor yang dimaksud tidak hanya *human*, namun juga *non-human*. Dalam hal ini penekanan ‘aktor’ dalam terminologi Latour terletak pada aspek tindakan yakni kemampuannya dalam bertindak atau memicu aktor lain untuk bertindak. Hal ini berbeda dengan definisi sosiologi konvensional yang memaknai aktor semata sebagai ‘entitas sosial’ (Stalder, 1997). ANT berfokus pada aktor-aktor dalam jaringan sosio-teknis dan bagaimana mereka dilibatkan dalam membentuk pola, penyebaran sosial (Monteiro dan Hanseth, 1996; Walsham, 1997).

Dalam rangka ‘menantang’ pandangan ilmuwan sosial yang hanya fokus pada aktor (entitas) sosial, teoritikus ANT berpendapat bahwa unsur *non-human* juga memiliki agensi—dalam konteks tindakan tadi. Karena itu, unsur *non-human* juga dapat menjadi aktor. Dalam konteks ini, setidaknya ada tiga pandangan: *Pertama*, manusia bukan merupakan satu-satunya aktor yang membentuk dunia; unsur materi juga dapat memberikan dampak dan pengaruh terhadap unsur-unsur lainnya dalam jaringan, termasuk manusia (Vicsek et al, 2016: 82). Latour (1992) menggambarkan hal ini dengan contoh misalnya dengan bagaimana cara membuat pengendara motor untuk berkendara lebih pelan. Untuk mencapai tujuan tersebut, polisi lalu lintas dapat menerapkan berbagai cara, misalnya dengan memasang rambu kecepatan maksimal, membuat *speed bump*, memasang kamera otomatis untuk memotret pengendara motor yang kecepatannya melebihi batas atau meminta pihak kepolisian untuk hadir di spot-spot tertentu (Latour, 1992).

Kedua, aktor tak pernah sendiri dalam bertindak. Aksi/tindakan dalam ANT selalu diartikan dalam konteks interaksi (Sayes, 2004) sejauh aktor dapat memobilisasi unsur lainnya dalam jaringannya, dengan tujuan untuk membentuk/melahirkan dampak pada

lingkungannya (Vicsek et al, 2016: 82). *Ketiga, non-human* juga dapat berkontribusi dalam penyusunan/pembentukan lingkungan sosial, memberikan daya tahan pada norma dan nilai sosial melalui beragam ruang dan waktu; memperpanjang kuasa bagi siapa saja yang membentuk, mempertahankan dan menjalankan jaringan (Vicsek et al, 2016: 82).

Latour menekankan bahwa aktor-aktor *non-human*, seperti teknologi, regulasi, prosedur, kebijakan, isu dan seterusnya, juga dapat mempengaruhi struktur jaringan. Selama ia memiliki relasi dengan aktor lain dalam jaringan dan bahkan mampu membentuk jaringannya sendiri, maka (aktor *non-human*) tersebut memiliki pengaruh yang sama dengan aktor *human*. ANT melihat realitas sosial merupakan hasil interaksi dari aktor *human* dan *non-human*.

Lebih jauh, aktor-aktor (*human* dan *non-human*) ini kemudian secara bersama-sama membentuk sebuah jaringan temporer, menciptakan ‘kumpulan-kumpulan’ (*assemblages*) relasi, baik yang spesifik pada individu atau peristiwa yang lebih luas—yang saling terhubung dalam jaringan tersebut (Potts, 2009: 286).

Adapun aktor yang dapat memicu aktor lain untuk turut terlibat dalam jaringan disebut sebagai ‘aktan.’ Potts (2009) mendefinisikan ‘aktan’ sebagai: “Sejumlah aktor yang memiliki kemampuan untuk bertindak dan melakukan tindakan (*act and do act*) dalam jaringan. Dari pandangan ini, peneliti dapat melihat keseluruhan lanskap dari partisipan aktif, manusia atau teknologi, yang secara bersama-sama menciptakan, membagikan dan memvalidasi informasi yang kemudian mereka tampilkan melalui jaringan (Potts, 2009).

Dalam ANT, kepentingan dan agenda dari aktor-aktor dapat sangat bervariasi. Keberbedaan ini dapat mendorong atau membatasi terbentuknya sebuah jaringan sosio-teknis. Karena itu, dalam membangun sebuah jaringan diperlukan penyelarasan kepentingan dan agenda dari aktor-aktor di dalam jaringan. Ketika kepentingan dan agenda dari aktor-aktor dalam jaringan dapat diselaraskan, maka jaringan akan menjadi stabil dan penyebaran informasi dalam jaringan menjadi mapan/terbangun dengan kuat.

Dalam ANT, proses penyelarasan kepentingan dan agenda dari para aktor ini dinamakan dengan translasi. Translasi dapat dilakukan dalam jaringan melalui definisi dan makna yang umum, dan inskripsi-inskripsi yang disematkan pada upaya pembangunan jaringan. Callon (1991: 142-5) mengatakan bahwa translasi dilakukan guna meluruskan perbedaan agenda dan kepentingan dari para aktor. Apabila proses ini gagal, maka jaringan akan lemah. Latour (1999: 178) mendefinisikan translasi sebagai: ‘pemindahan, penyimpangan, penemuan, mediasi dan penciptaan suatu hubungan yang sebelumnya tidak ada dan hingga level tertentu mampu memodifikasi jaringan aslinya.”

Callon (1986: 24) sebagaimana dikutip Horowitz (2012), menjelaskan translasi sebagai suatu proses yang melibatkan upaya penghubungan “entitas heterogen” untuk membentuk sebuah jaringan-aktor melalui penugasan (*assigning*), ke tiap entitas tersebut, “suatu identitas, kepentingan, sebuah peran untuk disimulasikan, jalur/haluan aksi untuk diikuti dan proyek/rencana untuk dijalankan. Dalam proses ini, translator menjadi “*spokes[person]*” dari entitas yang ia bentuk,” menyampaikan atau menginterpretasikan “Hasratnya, pemikiran tersembunyi mereka, kepentingan mereka dan mekanisme pengoperasian” (Callon, 1986a: 25). Sementara, Callon, Law dan Rip (1986: xvi) memandang bahwa “*roles are not fixed and pre-established*”, dan aktor yang berbeda dapat menggabungkan dan mendefinisikan entitas-entitas ini dalam proses/cara yang berbeda untuk “membentuk kemajemukan dari *different and incommensurate worlds*” (Callon 1986a: 24). Setelah menyampaikan skenario kepada entitas-entitas dalam jaringan, upaya yang perlu dilakukan seorang translator selanjutnya adalah menjadikan dirinya sebagai sebuah “jalur yang diperlukan” (*obligatory passageway*), yakni “suatu *strategic point* yang harus dilalui oleh jaringan-aktor” (Callon, 1986a: 27). Dengan kata lain, translator akan mendefinisikan

Hasrat aktor lain yang perlu didapatkan, dan kemudian berupaya untuk mensimulasikan bahwa jalan satu-satunya untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan persetujuan seorang translator. Proses translasi terbagi ke dalam empat alur yakni: *problematization*, *interessement*, *enrollment*, dan *mobilization* (lihat Callon, 1986; Latour, 1987).

Callon (1986) menjelaskan keempat alur ini sebagai berikut:

- *Problematization*, adalah ketika sebuah isu atau masalah dihadirkan oleh translator (inisiator aksi) agar menjadi perhatian aktor-aktor lain. Dalam tahap ini, inisiator mendefinisikan peran dari aktor lain, di mana definisi kepentingan harus konsisten dengan translator (Callon, 1986, 1991). Satu atau lebih pelaku utama mencoba untuk menentukan inti dari masalah dan peran untuk pelaku yang lain.
- *Interessement*, yakni apabila momen problematisasi berhasil, para aktor yang terstimulasi akan mengikuti inisiasi aktor tadi atau justru menolaknya. Inisiator aksi kemudian melanjutkan inisiasinya dengan berupaya meyakinkan aktor-aktor lain bahwa apa yang diinisiasinya penting bagi yang lain. Aktor akan meyakinkan para pelaku lain bahwa kepentingan yang didefinisikan oleh para translator sejalan dengan kepentingan mereka sendiri. Callon, Law dan Rip (1986: xvii) menjelaskan tahap ini sebagai proses yang melibatkan “*one entity attracting a second by coming between that entity and a third.*” Pada tahap ini, aktor-aktor akan ‘menandai’ hubungan privilege mereka dengan translator dalam sebuah sistem aliansi, dan berupaya untuk memperluas jaringan dengan meyakinkan aktor-aktor lain untuk menerima definisi yang disampaikan translator atas hasrat dan kepentingan mereka.
- *Enrollment*, terjadi jika *interessement* berhasil. Proses ini dimulai saat para aktor mulai saling mendelegasikan satu terhadap yang lain dan saling menjajaki kompetensi. Atau dengan kata lain mengimplementasikan peran yang telah didefinisikan pada tahap *problematization* tadi kepada aktor lain. Pada fase ini, untuk membangun sebuah jaringan yang solid—yakni untuk membuatnya tidak dapat diubah (Callon, 1991)—para pelaku perlu untuk diorganisir. Pengorganisasian ini terkait dengan peran-peran yang telah ditetapkan translator kepada para aktor. Callon (1986a: 211) menyebut tahap ini membutuhkan serangkaian “negosiasi multilateral, pengujian *strength and tricks.*”
- *Mobilization*, terjadi saat jaringan aktor telah mendapatkan wujudnya, memiliki eksistensi temporal (*durable*) dan eksistensi spasial. Para aktor dan mediator telah sampai pada suatu keadaan konvergen, meski hakekatnya heterogen. Callon (1986a:28) sebagaimana dikutip Horowitz (2012:809) menjelaskan momen *mobilization* ini sebagai suatu proses di mana aktor-aktor yang menjadi representasi dari translator/inisiator aksi berupaya untuk meyakinkan anggota lain dalam jaringan untuk menjalankan peran yang telah disepakati. Lebih lanjut, Callon menjelaskan bahwa: “*At every stage, seduced or forced to follow the itinerary thus laid out for them, actors and intermediaries experience “displacement”, the literal movement necessary to “solidify” the actor-worlds and thus render the translation successful.*”

Sebuah proses translasi—yang pada dasarnya dimaknai sebagai sebuah upaya untuk menetapkan peran dan mengontrol para aktor dalam jaringan—tidak selalu berhasil. Sebab, setiap aktor dalam jaringan terkadang sulit diprediksi. Karena itu proses translasi dapat berjalan tidak sukses di antara empat momen di atas: aktor-aktor lain bisa saja menolak definisi atas mereka atau hasrat dan kepentingan mereka yang ditetapkan oleh translator; mereka juga dapat menolak ajakan/bujukan dari translator agar masuk/terlibat dalam jaringan; mereka juga dapat menolak peran yang ditetapkan atas mereka; atau menolak proses

mobilisasi yang dinegosiasikan kepada mereka. Jika hal ini terjadi, maka jaringan-aktor akan menjadi tidak stabil.

Oleh karena itu, translasi juga dapat dimaknai sebagai proses ‘perebutan/pengejaran’ kekuasaan (*power struggle*), melalui pembangunan aliansi ke dalam jaringan. Namun, para pemikir ANT seperti Latour (1986), Lat (1991) menekankan bahwa kuasa, baik kuasa atas (“*power over*”) dan kuasa terhadap (“*power to*”) harus dianalisa tidak hanya sebagai kepemilikan kuasa atau kapasitas aktor untuk berkuasa, melainkan sebagai sesuatu yang relasional, tergantung pada dan dibatasi dengan kemampuan untuk membujuk/mengajak atau memaksa aktor lain yang secara bersamaan juga memiliki dan mengejar kepentingan/agenda mereka sendiri (Horowitz: 2012, 809). Atas hal ini, Horowitz mengatakan bahwa agar proses translasi berhasil, maka diperlukan pendekatan yang mana dapat membuat berbagai upaya yang dilakukan dalam proses tersebut kompatibel dengan translasi yang juga berjalan atau disimulasikan aktor lain. Horowitz (2012, 910) kemudian menyebut proses ini sebagai penyelarasan translasi (“*translation alignment*”). Istilah ini dalam beberapa hal mirip/serupa dengan “*frame alignment*,” atau lebih khususnya pada “*frame bridging*” sebagaimana digambarkan oleh Benford dan Snow (2000: 624), yang mempertimbangkan adanya dimensi kuasa interpretasi (*the power dimensions of interpretation*) dalam upaya untuk meraih hasil yang diinginkan (translator) dan upaya untuk memanipulasi tujuan aktor lain.

METODE

Metode analisis jaringan komunikasi secara sederhana bisa didefinisikan sebagai metode yang berusaha menggambarkan dan menjelaskan jaringan sosial dan struktur jaringan (Eriyanto, 2014: 5). Dalam penelitian jaringan, aktor memiliki jaringan tersendiri, dan apa yang dilakukan peneliti adalah menggambarkan relasi aktor (responden) tersebut dengan aktor lain. Dengan karakteristik penelitian jaringan semacam ini, konsekuensinya ada pada penarikan sampel untuk penelitian jaringan (Eriyanto, 2014: 11). Dalam hal ini, Eriyanto mengatakan bahwa teknik penarikan sampel pada studi jaringan lebih rumit dan kompleks dibandingkan dengan penelitian atributif, seperti survei. Karena penelitian jaringan lebih melihat pada jaringan, dan jaringan secara teoretis tidak terbatas—peneliti tidak bisa membatasi relasi orang pada kelompok tertentu.

Carrington (2014) mengatakan bahwa penelitian jaringan pada dasarnya bukan merupakan penelitian kualitatif, namun juga bukan kuantitatif; penelitian jaringan merupakan penelitian yang bersifat struktural. Dalam hal ini, penelitian jaringan menekankan pada struktur, yakni pada bagaimana struktur jaringan diungkap dan kemudian digambarkan. Dalam penelitian jaringan, struktur jaringan tidak terlepas dari konteks sosial. Dalam artian, semua yang ada dalam jaringan *embedded* pada konteks sosialnya. Dalam hal ini, konteks sosial dari jaringan komunikasi pasangan Jokowi-Maruf di Jabar adalah Pilpres 2019.

Borgatti, Everett dan Johnson (2013) mengungkapkan bahwa analisis dari struktur jaringan sosial, dapat dilakukan dengan memfokuskan pada aktor sosial (*ego network*) atau sebagai sistem (*complete network*). Perbedaan di antara dua jenis jaringan ini terletak pada apakah analisis memusatkan perhatian hanya pada satu atau beberapa aktor (*node*) ataukah melihat dan memperhitungkan semua aktor (*node*). Pada jaringan utuh, semua aktor (*node*) dalam jaringan diamati dan dianalisis. Sebaliknya dalam jaringan yang berpusat pada ego, kita hanya memusatkan perhatian pada aktor (*node*) tertentu (Eriyanto, 2014: 53). Pada penelitian *ego network*, tidak terdapat batasan (*boundary*). Seorang peneliti akan menelusuri jaringan dari seorang aktor, hingga jaringan tersebut menemui titik jenuhnya. Adapun, pada penelitian *complete network*, dibutuhkan *network boundary*, sebagai basis justifikasi.

Dalam hal ini, Prell (2012) dan Eriyanto (2014) mengungkapkan dasar penentuan *network boundary* dalam *complete network* dengan dua pendekatan, yakni: (1) Pendekatan Realis/Reputasional dan (2) Pendekatan Nominalis. Pendekatan realis melihat jaringan komunikasi harus dilihat dari perspektif informan. Peneliti tidak boleh menggunakan asumsi subjektif dalam menentukan jaringan dari aktor. Peneliti sebaliknya membiarkan aktor menentukan dan mendefinisikan jaringan, dan kemudian menggambarkan jaringan yang dibentuk oleh aktor (Eriyanto, 2014: 81). Karena itu, *network boundaries* ditentukan peneliti dengan menanyakan opini aktor yang telah diidentifikasi oleh peneliti. Aktor-aktor ini akan diminta untuk mengidentifikasi aktor lain yang ada di populasi tertentu. Sedangkan, pendekatan nominalis melihat bahwa jaringan dan definisinya bisa ditentukan berdasarkan kerangka konseptual dari peneliti.

Peneliti bisa mendefinisikan jaringan dan batasan-batasannya sesuai dengan tujuan dan kerangka penelitian yang dipakai. Oleh karena itu, *network boundaries* pada pendekatan nominalis ditentukan berdasarkan keterlibatan aktor dalam sebuah peristiwa atau konteks yang diusulkan oleh peneliti. Sehingga setiap aktor yang ada dalam peristiwa atau konteks tersebut dianggap sebagai bagian dari jaringan yang akan diteliti.

Adapun terkait dengan jenis penelitian, penulis menggunakan jenis penelitian eksploratif. Penelitian ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan “apa” dan suatu fenomena atau gejala sosial. Penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi suatu topik atau fenomena tertentu. Penelitian jenis ini dilakukan jika belum ada penelitian sebelumnya, sehingga tidak ada pengetahuan yang memadai mengenai topik tersebut (Eriyanto, 2014: 56). Arti penting dari studi eksploratif diukur dari kebaruan topik yang sebelumnya belum pernah diteliti atau bisa menjawab pertanyaan, asumsi, atau dugaan yang berkembang dalam masyarakat. Dalam studi jaringan, tipe penelitian eksploratif mengeksplorasi pola jaringan tertentu yang belum pernah diteliti. Dalam hal ini, penelitian mengenai kontestasi Pemilu atau Pemilu Presiden (Pilpres) merupakan suatu topik yang umum. Kendati demikian, belum pernah ada suatu penelitian yang membahas topik Pemilu/Pilpres dengan menggunakan sudut pandang ANT. Oleh karena itu, penulis mengkategorikan penelitian ini sebagai penelitian eksploratif.

DISKUSI

Walaupun tidak pernah menyatakan dukungan secara langsung, akan tetapi, arah dukungan NU kepada Jokowi terlihat dari pernyataan sejumlah tokohnya. Seperti putri mantan Presiden RI ke-4, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Yenny Wahid. Pada acara Maulidurrasul Harlah 73 Tahun Muslimat NU dan Doa untuk Keselamatan Bangsa, yang digelar di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada 27 Januari 2019, ia mengatakan NU memiliki kedekatan khusus dengan Presiden Jokowi (Lestari, 2019). Kemunculan NU dalam jaringan komunikasi Jokowi-Ma'ruf di Jabar dilatarbelakangi oleh terpilihnya Kyai Ma'ruf sebagai Cawapres yang mendampingi Jokowi. Sebagai mantan Rais Aam PBNU, Kyai Ma'ruf turut membawa gerbong dukungan NU untuk kemenangan Jokowi-Ma'ruf. Pada masa kampanye Pilpres2019, NU turut berperan dalam sejumlah kegiatan, yang turut memperbaiki citra Jokowi yang selama masa pemerintahannya dianggap berseberangan dengan kelompok Islam.

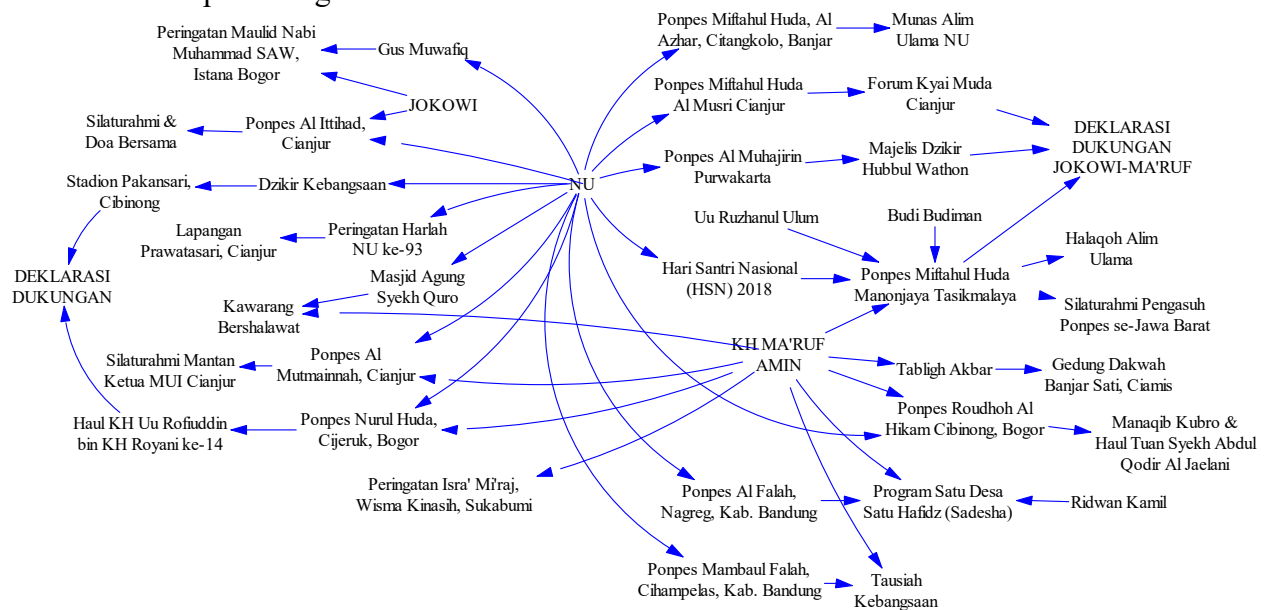
Pendekatan keagamaan yang dilakukan pasangan Jokowi-Ma'ruf pun sebagian besar menyasar pada pondok pesantren (ponpes) yang berafiliasi dengan NU di Jabar. Sejumlah kegiatan yang dilakukan TKN Jokowi-Ma'ruf dalam pendekatan keagamaan antara lain (Ramadhani, 2019):

- Deklarasi dukungan Forum Kiai Muda Cianjur (FKMC) untuk pasangan Jokowi-Maruf

- pada 20 September 2018 di Pondok Pesantren (Ponpes) Mifathul Huda Al Musri, Cianjur (Ismanto, 2018).
- Doa untuk Sulawesi Tengah dan Halaqah Kebangsaan Syuriah NU dan Kiai Lembur II-III Jabar yang diadakan oleh Pengurus Besar Majelis Dzikir Hubbul Wathon di Ponpes Al Muhajirin, Sukatani, Purwakarta pada 3 Oktober 2018 (Nurita, 2018). Dalam acara ini, sebanyak 1.500 Kiai Kampung di Jabar juga mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan Jokowi-Maruf (Nurita, 2018).
- Silaturahmi KH Maruf ke Pesantren Miftahul Huda Manon Jaya, Tasikmalaya, pada 21 Oktober 2018 (Antara, 2018).
- Peringatan Hari Santri Nasional (HSN) ke-3 di Bandung dan Garut, pada 22 Oktober 2018.
- Launching Program Sadesha (Satu Desa Satu Hafidz)—yang digagas Gubernur Jabar Ridwan Kamil—di Ponpes Al-Falah pada 9 November 2018 (Putra, 2018).
- Pertemuan Jokowi dengan ulama sekaligus peringatan Maulid Nabi Muhammad SWT di Istana Bogor pada 21 November 2018 (Prasetia, 2018).
- Deklarasi dukungan Ulama-ulama NU se-Jabar untuk pasangan Jokowi-Maruf di kediaman KH Maruf Amin, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat pada 11 Desember 2018 (Septianto, 2018).
- Silaturahmi KH Maruf Amin ke Ponpes Yayasan Perguruan Islam El Nur El Kasysyaf (Yapink) Bekasi pada 22 Desember 2018 (Alhaki, 2018).
- Manaqib Kubro dan Haul Tuan Syekh Abdul Qodir Jaelani di Pondok Pesantren (Ponpes) Roudhoh Al-Hikam, Cibinong, pada 5 Januari 2019 (Sihaloho, 2019).
- Silaturahmi Jokowi dengan Pimpinan Ponpes Darul Arqam Muhammadiyah, Garut, pada 18 Januari 2019 (Persiana, 2019)
- Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan deklarasi dukungan para santri Ponpes Manbaul Falah, Kab. Bandung Barat pada 20 Januari 2019 (Putra, 2019).
- Pertemuan Jokowi dengan 400 kiai dan habaib yang berdomisili di Jakarta, Depok Tangerang dan Bekasi, di Istana Negara, pada 7 Februari 2019.
- Kunjungan Jokowi ke Ponpes Al-Ittihad, Cianjur, pada 8 Februari 2019.
- Peringatan Hari Lahir (Harlah) NU ke-93 di Lapangan Prawatasari, Cianjur. pada 14 Februari 2019 (Mawardi, 2019).
- Silaturahmi KH Maruf Amin ke kediaman mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cianjur sekaligus pimpinan Ponpes Al-Muthmainnah, R. Abdul Halim, pada 14 Februari 2019 (Merdeka.com, 2019).
- Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar Nadlatul Ulama (Konbes NU) di Ponpes Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Kota Banjar, pada 27 Februari hingga 1 Maret 2019 (Nugraha, 2019).
- Tabligh Akbar di Banjarsari, Kab. Ciamis, yang dihadiri KH Maruf Amin di Gedung Dakwah Banjar Sati, Ciamis, pada 28 Februari 2019 (Umam, 2019).
- Kehadiran KH Maruf Amin dalam kegiatan Karawang Bershalawat sekaligus ziarah ke makam Syekh Quro Masjid Agung Syekh Quro, Karawang pada 2 Maret. 2019 (Nuary, 2019).
- Dzikir Kebangsaan bertajuk “Menguatkan Peran Ulama dalam Menangkal Hoax untuk Pilpres dan Pemilihan Legislatif (Pileg) Bermartabat” di Stadion Pakansari, Cibinong, Jabar, pada 9 Maret 2019 (Jpnn, 2019).
- Peringatan Isra’ Mi’raj di Wisma Kinasih, Salabintana, Sukabumi pada 3 April 2019.
- Peringatan Hari Ulang Tahun (Haul) KH Uu Rofiuddinn bin KH Royanin ke-14 serta

deklarasi dukungan para kiari se-Karesidenan Bogor, di Ponpes Nurul Huda, Cijeruk Bogor Selatan pada 11 April 2019 (Media Indonesia, 2019).

Apabila sejumlah kegiatan/pendekatan di atas digambarkan ke dalam gambar sosiometri, maka akan tampak sebagai berikut:



Gambar 1.1.

Jaringan Komunikasi NU dalam Sejumlah Pendekatan TKN Jokowi-Ma'ruf di Jabar

Jika dilihat dalam gambar sosiometri di atas, sejumlah pendekatan keagamaan yang di atas dilakukan dalam lingkup jaringan Ponpes dan kegiatan-kegiatan khas warga NU, seperti peringatan Maulid Nabi, Manaqib, Haul dan Tabligh Akbar. Di mana, kegiatan-kegiatan keagamaan ini jarang atau bahkan tidak pernah digelar oleh kelompok-kelompok Islam di Jabar, yang cenderung konservatif, dan tekstual dalam memahami ajaran Islam. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan keagamaan tersebut hanya menjaring warga NU di Jabar.

Adapun dalam hasil penelusuran penulis, dari sejumlah kegiatan/pendekatan keagamaan tersebut di atas, setidaknya ada dua kegiatan yang kemudian berdampak luas dalam jaringan komunikasi pasangan Jokowi-Ma'ruf di Jabar. Dua kegiatan tersebut yakni peringatan Hari Santri Nasional (HSN) ke-3 yang diselenggarakan di Bandung dan Garut, serta Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama NU yang digelar di Kota Banjar, Jabar.

Hari Santri Nasional

Hari Santri Nasional (HSN) yang diperingati setiap 22 Oktober lahir berkat kontrak politik antara Jokowi dan Thoriq Darwis, kyai pengasuh pondok pesantren Babussalam Malang (Abdulsalam, 2018). Kontrak ini ditandatangani Jokowi, sebagai calon presiden, pada 27 Juni 2014 atau tiga hari sebelum pencoblosan Pilpres 2014 digelar, di mana, Jokowi berjanji akan menetapkan 1 Muharam sebagai hari santri apabila dia terpilih sebagai presiden (Abdulsalam, 2018). Dalam perkembangannya, penetapan 1 Muharam sebagai hari santri ini kemudian memunculkan polemik. Salah satunya Ketua DPW PPP Jawa Timur kubu Djan Faridz, Masykur Hasyim, yang mengatakan penetapan 1 Muharam sebagai hari santri akan mereduksi makna Tahun Baru Islam yang tersemat di tanggal tersebut (Abdulsalam, 2018).

Hal ini juga disampaikan Ketua PBNU Said Aqil Siradj. Ia kemudian mengusulkan agar hari santri ditetapkan setiap 22 Oktober. Hal ini mengacu pada perjuangan kemerdekaan yang dilakukan kalangan santri dan NU pada 22 Oktober 1945. Kesepakatan antara sejumlah

ormas Islam mengenai ditetapkan sebagai Hari Santri kemudian tercapai pada forum diskusi terbatas yang diselenggarakan Kementerian Agama (Kemenag) pada 15 Agustus 2015 (Abdulsalam, 2018). Presiden Jokowi kemudian menerbitkan Keppres Nomor 22 Tahun 2015 pada 15 Oktober 2015 yang menetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional.

Walaupun telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antar ormas Islam, penetapan 22 Oktober sebagai hari santri ditentang sejumlah pihak. Salah satunya Muhammadiyah. Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir, menyatakan pemilihan tanggal hari santri sangat eksklusif dan milik satu kelompok Islam—yakni NU (Abdulsalam, 2018). Jika santri didefinisikan sebagai orang-orang yang menimba ilmu di pesantren, Sekretaris Lembaga Pengembangan Pesantren PP Muhammadiyah Muhibb Abdul Wahab, menyatakan bahwa Muhammadiyah memiliki lebih dari 150 pesantren di seluruh Indonesia. Karena itu penetapan 22 Oktober sebagai hari santri dianggap tidak universal dan tidak mewakili kelompok-kelompok Islam di Indonesia (Abdulsalam, 2018).

Dari sini terlihat bahwa penetapan hari santri 22 Oktober sejak awal tampak hanya mengakomodir kepentingan warga NU, dan terkesan mengesampingkan kelompok agama lain. Bahkan, ormas terbesar kedua di Indonesia, Muhammadiyah, pun menentang penetapan hari santri pada 22 Oktober. Selain itu, jika melihat ‘pertentangan’ Jokowi dengan sejumlah kelompok Islam dengan beragam isu mulai dari Jokowi Anti-Islam dan Jokowi Anti-Ulama, penetapan HSN kemudian menjadi strategi yang tidak tepat sasaran. Sebab, kelompok-kelompok Islam yang menjadi penentang Jokowi sebagian besar berasal dari luar NU.

Pada tahun 2018, peringatan HSN digelar di beberapa kota besar. Adapun, di wilayah Jabar, puncak peringatan HSN digelar di Lapangan Gasibu, Kota Bandung, pada 21 Oktober 2018 malam, yang dihadiri Presiden Jokowi dan Wakil Gubernur (Wagub) Jabar Uu Ruzhanul Ulum. Dalam pembukaannya, Wagub mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi yang telah menetapkan HSN, karena sebelumnya tidak ada presiden yang menetapkan HSN. Menurutnya, kebijakan tersebut mencerminkan perhatian pemerintah terhadap kaum ‘sarungan’ (Khairina, 2018). Oleh karena itu, sebagai masyarakat ia siap mendukung program Presiden Jokowi di masa mendatang. Lebih lanjut, Wagub berharap, momentum HSN dapat menjadikan santri semakin eksis dan kian punya peran dalam bidang politik, sosial dan ekonomi (Khairina, 2018). Sementara, dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa perbedaan pilihan politik di kalangan santri pada masa Pilpres 2019 tidak menjadi soal. Karena, beda pilihan pada pesta demokrasi merupakan suatu hal yang wajar. Akan tetapi, ia mengingatkan, jangan sampai perbedaan politik tersebut membuat sesama muslim saling memfitnah dan saling menjelekkan (Djumena, 2018). Selain itu, Presiden juga mengingatkan soal maraknya penyebaran berita hoaks jelang tahun politik. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat agar lebih waspada dan bisa memilah informasi.

Selain di Bandung, peringatan HSN ke-3 juga digelar di Lapangan Otista Alun-alun Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut, pada 22 Oktober 2018. Garut sendiri dipilih sebagai lokasi perayaan HSN ke-3 karena wilayah ini merupakan titik tengah pesantren-pesantren yang ada di Tasikmalaya dengan pesantren-pesantren di wilayah Ciamis dan Banjar. Selain itu, Garut juga dikenal sebagai “wilayah hijau” setelah Tasikmalaya, di mana banyak berdiri pesantren-pesantren NU—ormas Islam terbesar di Indonesia yang mendukung Jokowi-Ma'ruf. Pada Pilpres 2019 Garut cukup potensial bagi Jokowi, karena memiliki jumlah pemilih terbesar keempat setelah Bogor Raya, Bandung Raya, dan Bekasi.

Dalam peringatan HSN ke-3 di Garut tersebut di atas kemudian terjadi insiden pembakaran bendera yang dianggap sebagai bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pembakaran dilakukan oleh anggota Barisan Serbaguna (Banser) organisasi masyarakat

(ormas) yang berada di bawah Gerakan Pemuda (GP) Ansor. Insiden pembakaran ini bermula saat lagu mars NU “Hubul Wathon” dinyanyikan. Saat itu, ada peserta HSN yang tiba-tiba menaikkan *Bendera Arroyah* yang kerap digunakan HTI. Sehari sebelumnya, para peserta HSN mulai dari FPI, Persis, NU, Muhammadiyah dan ormas lainnya telah sepakat untuk tidak mengibarkan bendera selain Bendera Merah Putih. Aksi pengibaran bendera ini kemudian menyulut emosi para anggota GP Ansor. Mereka lalu membakar Bendera Arroyah yang sering digunakan HTI dalam setiap kegiatannya. Aksi ini lalu menjadi viral di media sosial setelah video pembakaran bendera tersebut muncul satu jam setelah para peserta HSN ke-3 membubarkan diri.

Insiden pembakaran bendera yang dianggap sebagai Bendera HTI ini lalu menjadi momentum semakin jauhnya Jokowi dengan kelompok-kelompok Islam di luar NU. Terutama kelompok-kelompok Islam di Jabar yang tergolong lebih heterogen bila dibandingkan dengan kelompok-kelompok Islam misal di Jatim yang mayoritas merupakan warga NU. Hal ini disebabkan wacana yang meluas pasca insiden itu, bahwa pada bendera yang kerap digunakan HTI terdapat Kalimat Tauhid “*La illaha illallah, muhammada Rasulallah*” kalimat yang sangat sakral, dan karena itu bendera tersebut juga bisa disebut sebagai Bendera Tauhid. Hal ini diperkuat dengan pernyataan mantan Jubir HTI, Ismail Yusanto, bahwa HTI tidak memiliki bendera (Wahid, 2018). Adapun bendera yang kerap digunakan HTI dalam setiap kegiatannya merupakan Bendera dan Panji-panji Rasulullah yang disebut dengan *Ar Raya* berwarna hitam, dan *Liwa* berwarna putih (BBC Indonesia, 2018).

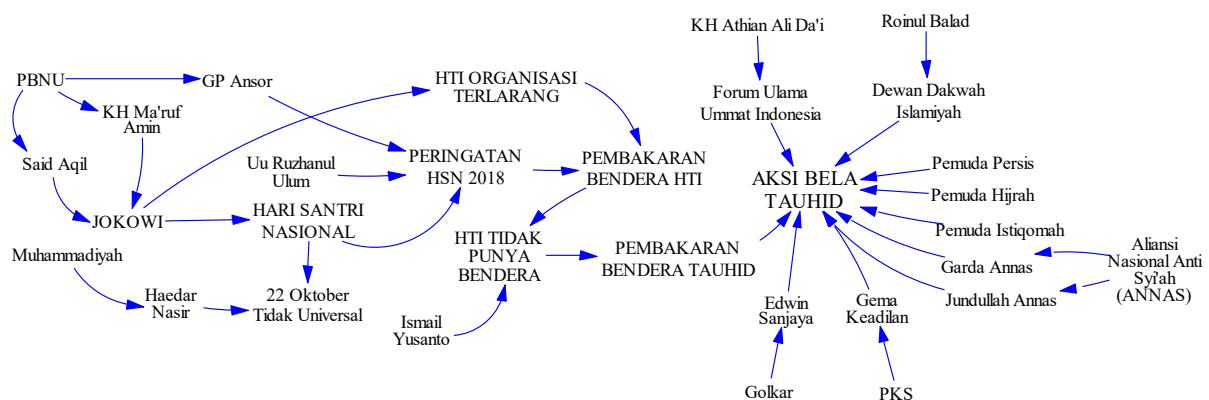
Berbagai protes dan demonstrasi bertajuk “Aksi Bela Tauhid” di sejumlah kota di Jabar, seperti Bandung, Bogor dan Sukabumi, serta juga di Jakarta, menjadi momentum konsolidasi kekuatan kelompok-kelompok Islam yang tidak mendukung Jokowi. Sejumlah ormas Islam yang turut dalam aksi tersebut antara lain: Forum Ulama Ummat Indonesia (FUUI), Dewan Dakwan Islamiyah (DDI), Aliansi Nasional Anti-Syiah (ANNAS) beserta badan-badan otonom di bawahnya seperti Jundullah Annas dan Garda Annas, Pemuda Persis, Gema Keadilan (Sayap Pemuda PKS). Selain itu, turut pula massa dari sejumlah komunitas seperti Pemuda Hijrah dan Pemuda Istiqomah (Fikri, 2018). Sejumlah tokoh yang turut dalam aksi tersebut antara lain KH Athian Ali Da’I (Ketua FUUI), Ustadz Roinul Balad (Ketua DDI), Asep Ruswan Effendi (Koordinator Lapangan Gema Keadilan), dan Edwin Senjaya (Wakil Ketua DPRD Kota Bandung sekaligus Ketua Harian DPD Golkar Kota Bandung).

Dalam ‘Aksi Bela Tauhid’ tersebut, para peserta aksi mengajukan beberapa tuntutan, antara lain:

- a. Mengecam keras tindakan pembakaran Bendera bertuliskan Kalimat Tauhid yang telah dilakukan oknum Banser dan menuntut agar pelaku tindakan tersebut dapat diproses hukum secara adil;
- b. Mendukung penuh pernyataan MUI yang telah meminta pelaku pembakaran untuk menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh umat Islam, serta menuntut agar Pimpinan GP Ansor dan Banser bertanggung jawab serta benar-benar mampu membina, mengarahkan juga mengendalikan seluruh anggotanya agar tidak mengulangi perbuatan tersebut;
- c. Menyatakan Bendera Tauhid merupakan milik seluruh Umat Islam dan bukan milik salah satu organisasi manapun;
- d. Meminta ketegasan sikap pemerintah serta aparat keamanan untuk melindungi simbol Umat Islam memberikan jaminan bahwa Bendera Tauhid tidak selalu disangkut-pautkan dengan gerakan HTI (Pradewo, 2018).

Jabar sendiri merupakan provinsi yang penduduknya dikenal agamis. Sekitar 97 persen penduduk Jabar beragama Islam. Namun, kelompok Islam di Jabar tidak identik dengan NU. Umat Islam di Jabar tergabung dalam sejumlah organisasi. Ormas-ormas dan komunitas Islam yang turut dalam ‘Aksi Bela Tauhid’ di atas setidaknya merupakan bukti bahwa kelompok Islam di Jabar amat beragam. Kelompok-kelompok Islam ini pun banyak berkembang di kota-kota besar di Jabar, seperti Bekasi, Depok, Bogor dan Bandung. Adapun NU lebih terkonsentrasi di Cirebon dan Tasikmalaya. Insiden pembakaran bendera ini kemudian membuat Jokowi dan NU semakin tereksklusi dalam konstelasi politik di Jabar. Apalagi jika mengingat GP Ansor, yang bertanggung jawab dalam aksi pembakaran bendera tersebut, merupakan badan otonom yang berada di bawah PBNU.

Jika jaringan komunikasi Jokowi-Ma’ruf dalam konteks Hari Santri Nasional digambarkan dalam gambar sosiometri, maka akan tampak sebagai berikut:



Gambar 1.2.

Jaringan Komunikasi Hari Santri Nasional dan Insiden Pembakaran Bendera Tauhid

Munas Alim Ulama NU

Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Nahdlatul Ulama (NU) merupakan forum pertemuan yang diselenggarakan PBNU untuk membahas masalah keagamaan (Alawi, 2019). Pada awalnya, Munas Alim Ulama diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu periode kepengurusan. Namun, menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU Helmy Faishal Zaini, sejak Mukmatamar NU ke-32 di Makassar pada 2010, diputuskan bahwa Munas yang biasanya diselenggarakan bersamaan dengan Konferensi Besar NU, harus dilaksanakan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu periode kepengurusan (Alawi, 2019).

Dalam periode Pilpres 2019, Munas Alim Ulama NU digelar di Pondok Pesantren (Ponpes) Miftahul Huda Al-Azhar, Citangkolo, Kota Banjar, Jawa Barat, pada 27 Februari 2019 hingga 1 Maret 2019. Munas Alim Ulama NU ini dibuka oleh Presiden Jokowi dan ditutup oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sejumlah tokoh hadir dalam Munas Alim Ulama NU 2019, di antaranya Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum, Wakil Walikota Banjar Nana Suryana, Ketua DPRD Kota Banjar Dadang R. Kalyubi, serta pengurus PBNU. Munas Alim Ulama NU ini merupakan acara besar yang diselenggarakan PBNU di Jabar. Sekitar 50 ribu *nahdliyin*—sebutan untuk jamaah NU—hadir dalam Munas tersebut.

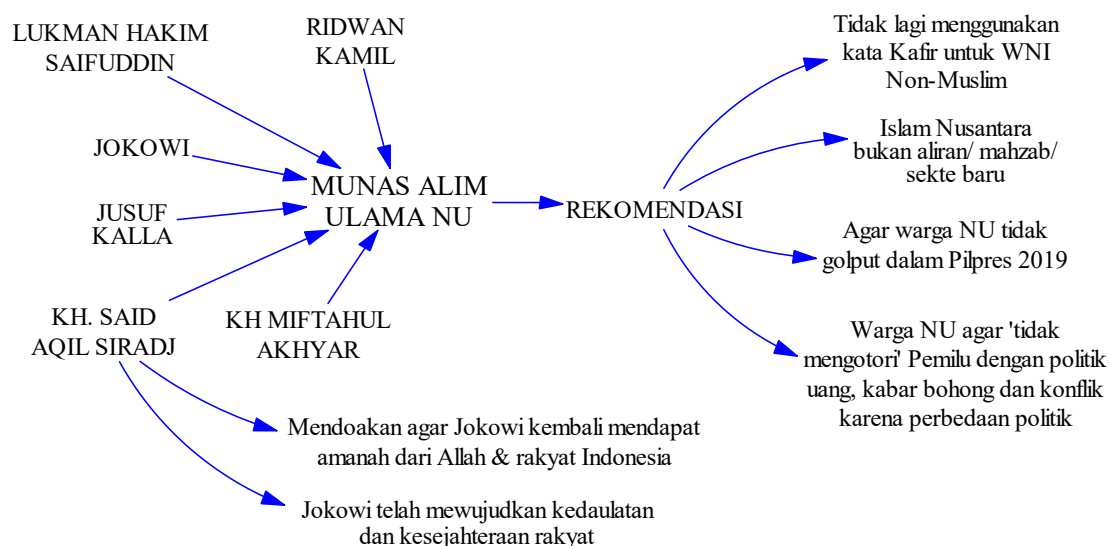
Munas Alim Ulama NU 2019 dibuka secara simbolis oleh Presiden Jokowi, didampingi oleh Rais Aam PBNU KH Miftahul Akhyar, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj, Menag Lukman Hakim Saifuddin dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan, NU telah memberikan kontribusi perjuangan dalam menjaga dan merawat Indonesia. Menurut Presiden, NU merupakan organisasi

terdepan dalam menjaga siapa pun yang ingin mengubah dan mempertentangkan Pancasila (Kastolani, 2019).

Penyelenggaraan Munas Alim Ulama NU yang dipusatkan di Jabar dapat dilihat sebagai upaya konsolidasi dukungan NU untuk Jokowi-Ma'ruf. Upaya pengkonsolidasian basis kekuatan NU untuk pemenangan Jokowi-Ma'ruf ini terlihat dari sejumlah rekomendasi yang dihasilkan, di antaranya soal sebutan kafir, Islam Nusantara, dan anjuran agar tidak golput. Sidang Komisi Bahtsul Masail Maudluiyyah, mengusulkan agar NU tidak menggunakan sebutan kafir untuk warga negara Indonesia yang tidak memeluk agama Islam (Wijanarko, 2019). Pimpinan sidang, Abdul Moqsith Ghazali, mengatakan para kiai berpandangan penyebutan kafir dapat menyakiti warga non-muslim di Indonesia.

Adapun, NU juga menyepakati pengertian konsep Islam Nusantara. Dalam pembahasan di Komisi Bahtsul Masail Maudluiyyah, para kiai NU menyatakan Islam Nusantara bukan aliran/mahzab/sekte baru. Dalam hal ini, PBNU menyatakan bahwa Islam Nusantara dalam pengertian substansial adalah Islam ahlu sunnah waljamaah yang diamalkan, didakwahkan, dan dikembangkan sesuai karakteristik masyarakat dan budaya Nusantara oleh para pendakwahnya (Wijanarko, 2019). Selain itu, Munas NU juga merekomendasikan agar kalangan internal NU tidak golput, dalam Pilpres 2019. NU menilai Pemilu harus disukseskan guna meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia. Dalam konteks Pemilu, NU juga turut merekomendasikan agar warga NU 'tidak mengotori' Pemilu dengan politik uang, kabar bohong dan konflik karena perbedaan politik. Terkait kabar bohong, NU mendorong masyarakat agar meningkatkan literasi digital untuk mengantisipasi penyebaran kabar bohong. Direktur TKN Jokowi-Maruf yang juga merupakan politisi PKB, Maman Imanulhaq menyatakan usulan Munas Alim Ulama NU untuk menghapus istilah kafir bagi non-muslim bisa menurunkan tensi politik menjelang Pilpres 2019 (Widiastuti, 2019).

Upaya pengkonsolidasian basis kekuatan NU untuk memenangkan Jokowi semakin terlihat ketika Ketua Umum PBNU, Said Aqil Sirodj mendo'akan Jokowi menang di Pilpres 2019 (Apinino, 2019). Di depan 8.000-an jajaran pengurus NU tingkat pusat hingga cabang di Pondok Pesantren Al-Azhar Citangkolo, Banjar, Said Aqil mendoakan agar Presiden Jokowi mendapat amanah kembali dari Allah dan rakyat Indonesia (Gatra, 2019). Doa tersebut, menurut Said Aqil, didasarkan pada prinsip bahwa sebuah kekuasaan haruslah berorientasi kedaulatan dan kesejahteraan rakyat. Di mana, PBNU menilai Jokowi telah mewujudkan itu pada empat setengah tahun kepemimpinannya (Gatra, 2019).



Gambar 1.2. Jaringan Komunikasi Munas Alim Ulama NU

Munas Alim Ulama NU kemudian ditutup oleh Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) pada 1 Maret 2019. Dalam sambutannya, JK mengapresiasi hasil yang telah dicapai dalam forum tertinggi di bawah Mukhtamar NU. Ia berharap pemerintah, seluruh masyarakat dan para ulama dapat mencapai hasil-hasil yang telah dicapai Munas Alim Ulama NU (CNN Indonesia, 2019).

Dalam konteks nasional, rekomendasi yang dihasilkan Munas Alim Ulama NU berdampak besar bagi upaya pemenangan Jokowi. Terutama di wilayah-wilayah yang menjadi basis NU seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah serta wilayah-wilayah yang mayoritas penduduknya non-Muslim. Akan tetapi, dalam konteks Jabar, rekomendasi Munas Alim Ulama NU tidak membuat upaya Jokowi meraih simpati dan suara dari masyarakat Jabar berjalan mulus. Sebab, kehadiran Jokowi dalam Munas Alim Ulama; hasil rekomendasi; serta doa Ketua PBNU untuk kemenangan Jokowi; justru semakin mengakumulasi dikotomi antara warga NU dan non-NU—yang mayoritas di Jabar, terutama di wilayah Bandung Raya, Bogor Raya dan Megapolitan (Bekasi dan Depok).

Terlebih dengan adanya insiden pembakaran ‘Bendera Tauhid’ yang diidentikkan sebagai ‘Bendera HTI’ oleh sejumlah anggota Banser. Kemenangan Jokowi di Kabupaten dan Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran setidaknya menjadi bukti bahwa komunikasi politik Jokowi-Ma’ruf melalui NU hanya berdampak di wilayah-wilayah Jabar yang berbatasan dengan Jateng. Di mana, secara kultur, wilayah-wilayah tersebut lebih dekat dengan Jateng, yang notabene merupakan salah satu basis terkuat NU di Indonesia, setelah Jatim.

KESIMPULAN

Dukungan PBNU dan GP Ansor merupakan konsekuensi dari didapuknya Rais Aam PBNU, KH. Ma’ruf Amin, sebagai Calon Wakil Presiden mendampingi Jokowi. Sosok KH. Ma’ruf Amin yang turut berperan sebagai saksi ahli yang turut memberatkan hukuman bagi mantan pendamping Jokowi di Pemprov DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), awalnya diharapkan dapat meng-*counter* isu-isu anti agama dan anti Islam yang menyerang Jokowi. Akan tetapi, pada prakteknya, keberadaan KH. Ma’ruf Amin, beserta gerbong dukungan PBNU dan GP Ansor tidak membuat isu-isu anti agama dan anti Islam mereda. Berbagai bentuk komunikasi pemerintah dan juga PBNU dalam koridor upaya deradikalisasi agama—yang menguat sejak Pilpres 2014—justru membuat dikotomi NU serta pihak Pemerintah dengan non-NU (kelompok-kelompok yang terafiliasi dengan peserta Aksi Bela Islam seperti FPI, GNPF Ulama) justru menguat.

Dalam konteks Jabar, upaya ‘mendekati’ kelompok-kelompok Islam dilakukan dengan memusatkan peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2018 di Bandung dan Garut. Di mana dari penelusuran penulis penetapan 22 Oktober sebagai momen peringatan HSN 2018 diputuskan tanpa merangkul semua golongan/kelompok Islam selain NU, bahkan Muhammadiyah—sebagai organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia. Hal ini memunculkan pandangan bahwa NU di bawah pemerintahan Jokowi tampak menjadi satu-satunya organisasi yang menguasai wacana-wacana keagamaan di tingkat nasional. Adapun kelompok-kelompok Islam di Jabar, terdiri dalam sejumlah organisasi yang tergolong homogen—cenderung konservatif dan tidak terafiliasi dengan NU. Adapun, basis massa NU di Jabar hanya ada di sejumlah kabupaten/kota saja, seperti Indramayu, Cirebon, Tasikmalaya dan Banjar.

Insiden pembakaran bendera yang dianggap sebagai bendera HTI oleh beberapa anggota Banser kemudian muncul sebagai momen penting dalam jaringan komunikasi politik Jokowi-Ma’ruf yang melibatkan NU. Insiden tersebut lalu membuat pasangan Jokowi-Ma’ruf

dan PBNU beserta organisasi di bawahnya yakni GP Ansor dan Banser semakin jauh dengan kelompok-kelompok Islam di Jabar. Kelompok-kelompok Islam di Jabar justru malah terkonsolidasi melalui ‘Aksi Bela Tauhid’ yang menuntut pembakaran bendera—yang kemudian dipandang sebagai Bendera Tauhid—diadili.

Sedangkan, Munas Alim Ulama NU, yang digelar dalam rangka untuk meng-counter sejumlah wacana keagamaan yang turut memunculkan polemik di masyarakat Jabar, tidak berdampak besar bagi upaya pemenangan Jokowi-Ma'ruf di Jabar. Sebab, hasil rekomendasi Munas Alim Ulama dan pernyataan Ketua Umum PBNU Said Aqil Sirajd yang mendo'akan kemenangan Jokowi, tampak hanya bergerak dalam koridor wacana versi pemerintah saja. Pelaksanaan Munas Alim Ulama NU di Kota Banjar pun setidaknya menjadi bukti bahwa kekuatan NU di Jabar semakin terpojok.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Eriyanto. (2014). *Analisa Jaringan Komunikasi*, Jakarta: Kencana.
- Littlejohn, Stephen W. dan Karen A Foss. (2003). *Theories of Human Communication*, Illinois: Waveland Press.
- Latour, Bruno. (2005). *Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network Theory*, New York: Oxford University Press.
- Carrington, Peter J., & John Scott. (2014). *The SAGE Handbook of Social Network Analysis*, Sage Publications.
- Borgatti, S.P., Everett, M. G., & Johnson, J.C. (2013). *Analyzing Social Networks*, “The Journal of Mathematical Sociology, 39:3.

Jurnal

- Vicsek, Lilla, Gabor Kiraly dan Hanna Edit Konya. (2016). *Networks in the social sciences: Comparing actor-network theory and social network analysis*, “Corvinus Journal of Sociology and Social Policy” Vol. 7 (2016) 2.
- Callon, Michel. (1986). *Some Elements of a Sociology of Translation: Domestication of the Scallops and Fishermen of St Brieuc Bay*. in J. Law, “Power, Action and Belief: a New Sociology of Knowledge?” Routledge, pp. 196-223.
- Law, Joh. (1992). *Notes on the theory of the actor-network: Ordering, strategy and heterogeneity*, “Systems Practice 5” 379-393.
- Stalder, Felix. (1997). *Actor-Network-Theory and Communication Networks: Toward Convergence*, dalam http://felix.openflows.com/html/Network_Theory.html
- Horowitz, Leah S. (2011). *Translation Alignment: Actor-Network Theory, Resistance, and the Power Dynamics of Alliance in New Caledonia*, “Antipode”, Vol. 44-3, p. 806-827.

Media Online

- 10 Provinsi dengan Pemilih Terbanyak Pemilu 2019*, 15 April 2019, dalam <https://www.tagar.id/10-provinsi-dengan-pemilih-terbanyak-pemilu-2019>
- Cuma Menang di 4 Kabupaten, Jokowi Keok di Jawa Barat*, 18 Juli 2014, dalam <https://regional.kompas.com/read/2014/07/18/18544391/Cuma.Menang.di.4.Kabupaten.Jokowi.Keok.di.Jawa.Barat>
- Jumlah DPT di Provinsi Jawa Barat 33 Juta*, 17 April 2019, dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/17/jumlah-dpt-di-provinsi-jawa-barat-33-juta>

Rekapitulasi KPU Jabar: Prabowo Ungguli Jokowi di 21 Daerah, 13 Mei 2019, dalam <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4547891/rekapitulasi-kpu-jabar-prabowo-ungguli-jokowi-di-21-daerah>

Wakili Suara Santri Milenial, Forum Kyai Muda Cianjur Dukung Jokowi-Ma'ruf Amin, 21 September 2018, dalam <https://www.tribunnews.com/nasional/2018/09/21/wakili-suara-santri-milenial-forum-kyai-muda-cianjur-dukung-jokowi-maruf-amin>

1.500 Kiai Kampung Jawa Barat Dukung Jokowi-Ma'ruf Amin, 3 Oktober 2018, dalam <https://pilpres.tempo.co/read/1132504/1-500-kiai-kampung-jawa-barat-dukung-jokowi-maruf-amin>

Ulama dan Santri Kota Tasikmalaya Deklarasi Dukung Jokowi-Ma'ruf, 5 Februari 2019, dalam <https://regional.kompas.com/read/2019/02/05/15490881/ulama-dan-santri-kota-tasikmalaya-deklarasikan-dukung-jokowi-maruf>

Zikir Kebangsaan, Ribuan Ulama Kabupaten Bogor Dukung Jokowi-KH Ma'ruf Amin, 9 Maret 2019, dalam <https://www.jpnn.com/news/zikir-kebangsaan-ribuan-ulama-kabupaten-bogor-dukung-jokowi-kh-maruf-amin>

Hari Santri Nasional dan Upaya NU Menguasai Wacana Kesantrian, 24 Oktober 2018, dalam <https://tirto.id/hari-santri-nasional-dan-upaya-nu-menguasai-wacana-kesantrian-c8qk>

Wagub Jabar: Sebelumnya Tidak Ada Presiden yang Menetapkan Hari Santri, 21 Oktober 2018, dalam <https://regional.kompas.com/read/2018/10/21/21534011/wagub-jabar-sebelumnya-tidak-ada-presiden-yang-menetapkan-hari-santri>

Bagaimana pembakaran 'bendera HTI' itu jadi 'pembakaran bendera tauhid'?, 23 Oktober 2018, dalam <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45951832>

Aksi Bela Tauhid di Bandung Tuntut Pembakar Bendera Diadili, 26 Oktober 2018, dalam <https://nasional.tempo.co/read/1140235/aksi-bela-tauhid-di-bandung-tuntut-pembakar-bendera-diadili>

Ribuan Massa Aksi Bela Tauhid Serukan Tujuh Tuntutan, 26 Oktober 2018, dalam <https://www.jawapos.com/jpg-today/26/10/2018/ribuan-massa-aksi-bela-tauhid-serukan-tujuh-tuntutan/>

Munas Alim Ulama NU Sepakati Pengertian Islam Nusantara, 1 Maret 2019, dalam <https://nasional.tempo.co/read/1180695/munas-alim-ulama-nu-sepakati-pengertian-islam-nusantara>

Tim Jokowi Sebut Usul NU Hapus Istilah Kafir Bisa Hindari Konflik, 2 Maret 2019, dalam <https://nasional.tempo.co/read/1181210/tim-jokowi-sebut-usul-nu-hapus-istilah-kafir-bisa-hindari-konflik>